

2025

G. DINAS SOSIAL

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL KOTA
PAYAKUMBUH

TAHUN 2025 - 2029

KOTA PAYAKUMBUH



KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Payakumbuh merupakan dokumen daerah yang berisi upaya-upaya pembangunan kesejahteraan sosial yang diuraikan dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan, indikator, target, beserta kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2025-2029. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun Dinas Sosial Kota Payakumbuh menyusun Renstra dengan mengacu pada Ranwal RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2025-2029.

Rancangan Akhir Renstra ini dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) di tingkat unit kerja Eselon II di Lingkungan Dinas Sosial Kota Payakumbuh dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat Eselon III dan Eselon IV yang disertai kebutuhan pendanaan. Sinergi semua pihak diharapkan untuk mewujudkan Rencana Aksi Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial guna tercapainya sasaran pembangunan di bidang social dan seluruh komponen penyelenggara pembangunan di bidang sosial.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Ranwal Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029. Pada kesempatan ini pula, saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi sesuai proses bisnis Dinas Sosial dalam menyelenggarakan pembangunan Kesejahteraan Sosial guna tercapainya sasaran pembangunan di bidang Sosial. Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Dinas Sosial ini mendapatkan ridha dari Allah SWT dan seluruh komponen penyelenggara pembangunan di bidang Sosial diberikan kekuatan dan keikhlasan untuk melaksanakan apa yang telah dirumuskan dalam Renstra ini. Aamiin.

Payakumbuh, Oktober 2025

Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



YONREFLI, S.Sos, M.AP
NIP.196911081991031006

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL	8
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial	11
2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial	11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	12
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial	19
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial	22
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	22
2.2.2 Isu Strategis	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
3.1 Tujuan Renstra Dinas Sosial	25
3.2 Sasaran Renstra Dinas Sosial	25
3.3 Strategi Renstra Dinas Sosial	26
3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial	27
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL	29
BAB V. PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data dan Komposisi Dinas Sosial Kota Payakumbuh	11
Tabel 2.2	Data Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Payakumbuh	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh	13
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh	14
Tabel 2.5	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Payakumbuh Tahun 2024	19
Tabel 2.6	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Payakumbuh (PSKS) Kota Payakumbuh	20
Tabel 2.7	Data Keluarga Penerima Manfaat yang memperoleh Sembako Kota Payakumbuh Tahun 2020 - 2024	20
Tabel 2.8	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif Kota Payakumbuh	21
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial	25
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah	26
Tabel 3.3	Strategi Dinas Sosial Kota Payakumbuh	27
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	28
Tabel 4.1	Indikator Rencana Program Disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Sosial Kota Payakumbuh	31
Tabel 4.2	Daftar subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	50
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama PD	51
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci	52
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Lainnya	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 ayat 1, dimana Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Hal ini juga mengacu pada amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1) dan (2).

Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari RPJPD dan RPJMD Kota Payakumbuh. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada analisis terhadap evaluasi pembangunan daerah yang sudah berjalan dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pengendalian pembangunan Daerah serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, tugas dan fungsi sasaran perangkat daerah, identifikasi permasalahan, serta isu-isu strategis yang berkembang. Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dinas Sosial dalam penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Selain hal tersebut diatas, terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut :

1. Pergantian Kepala Daerah;
2. Penyesuaian Rencana Pembangunan Daerah terhadap Perkembangan Situasi Sosial, Ekonomi, dan Teknologi;
3. Penyesuaian dengan arah kebijakan dan program prioritas Kepala Daerah;
4. Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah dan Kualitas Layanan Publik;
5. Partisipasi Masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh 2025-2029 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-229 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227)
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh No. 68);
29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
30. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 73);

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tahun berjalan guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hubungan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya berada pada Dinas Sosial saja tetapi sangat bergantung kepada teknis lainnya yang terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial. Hal ini menjadi misi kota dalam mewujudkannya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sosial untuk mendukung visi misi Wali Kota terpilih.

2. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Payakumbuh periode 2025-2029;
3. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2025-2029;

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025- 2029 dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Dinas Sosial
- 3.2 Sasaran Renstra Dinas Sosial
- 3.3 Strategi Renstra Dinas Sosial
- 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Perwako Payakumbuh Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial, pada Bab II pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang Sosial.
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang Sosial.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan yaitu :

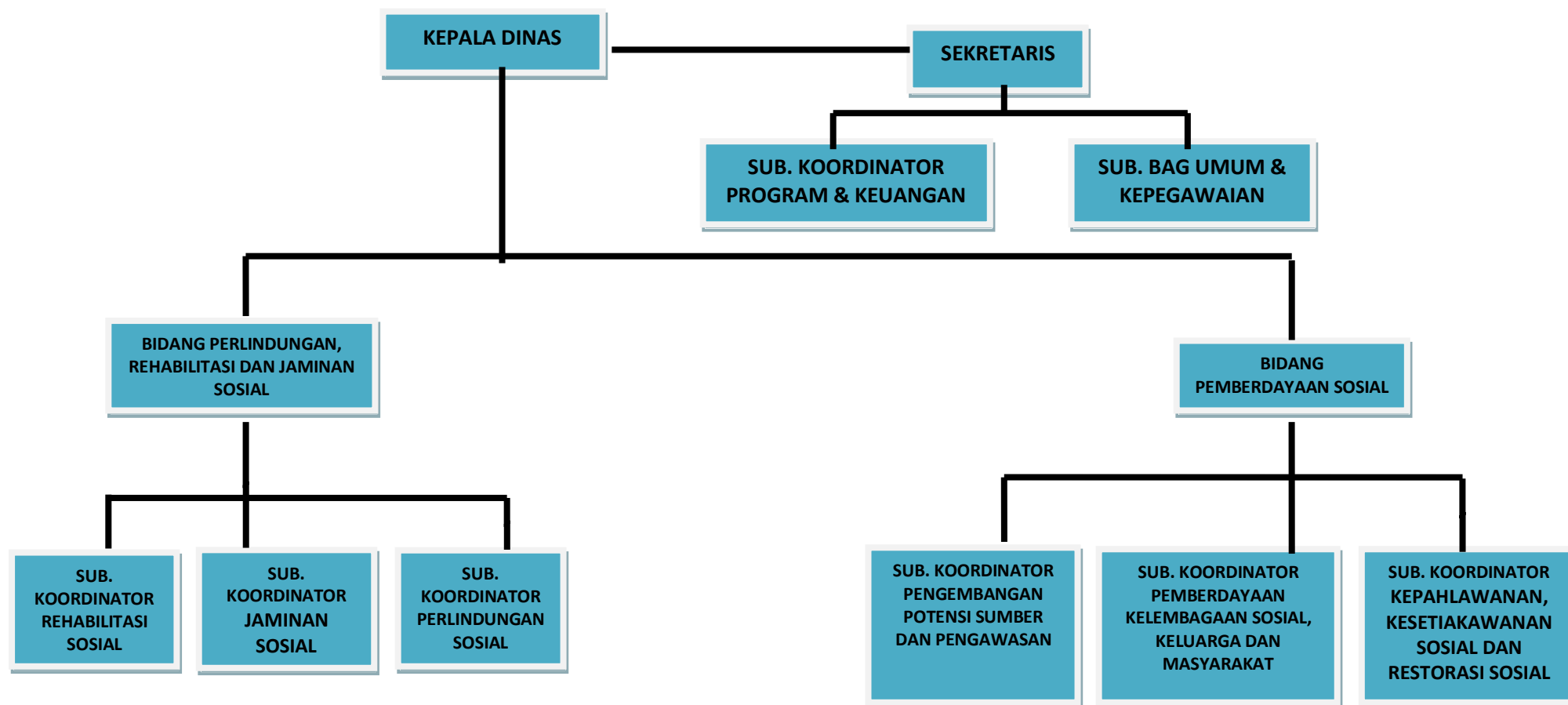
1. **Sekretaris** mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. **Kabid Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.

3. **Kabid Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial.

Di dalam pasal 3 menetapkan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Payakumbuh seperti yang tergambar dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH



Perwako Payakumbuh Nomor 50 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial

2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh saat ini sebanyak 23 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai berikut :

a. Potensi Aparatur

Tabel 2.1
Data dan Komposisi Dinas Sosial Kota Payakumbuh

NO	JABATAN	ESELON	LK	PR	JUMLAH
1	Kepala Dinas	II b	1	-	1 orang
2	Sekretaris	III a	1	-	1 orang
3	Kepala Bidang	III b	1	1	2 orang
4	Kasubag	IV a	-	1	1 orang
5	Jabatan Fungsional	-	2	5	7 orang
6	Pelaksana	-	4	2	6 orang
7	PPPK	-	-	5	5 orang
JUMLAH			9	14	23 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2025

b. Potensi Sarana dan Prasarana

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Payakumbuh

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kantor	1 unit	Kantor Bersama Jl. Gelatik (Puti Elok) Payakumbuh Utara
2	Kendaraan Dinas Roda Dua	18 unit	16 unit dalam kondisi Baik, 2 unit dalam kondisi rusak berat
3	Kendaraan Dinas Roda Empat	4 unit	Kondisi Baik
4	Kendaraan LK3 roda Empat	1 unit	Kondisi Baik
5	Kendaraan Tangki Air Roda Empat	1 unit	Kondisi Baik
6	Kendaraan Dapur Lapangan Roda Enam	1 unit	Kondisi Baik
7	Laptop	12 unit	Kondisi Baik
8	Printer	35 unit	Kondisi Baik
9	Personal Computer (PC)	21 unit	Kondisi Baik
10	Alat Pendingin / AC	7 unit	Kondisi Baik

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026, secara umum pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan nilai baik. Hal ini terukur dari pencapaian target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Berikut uraian secara ringkas capaian IKU Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 dan pencapaian SPM 2023 – 2026 :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu				0,60	0,80	1,00	-	-	13,81	0,0	0	-	-	100	100	100	-	-
2	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyeleng-garaan kesos				60	65	70	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
3	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS				99,80	99,90	100	-	-	125,38	100	100	-	-	100	100	100	-	-
4	Persentase PPKS yang terlayani				-	-	-	80	85	-	-	-	94	100	-	-	-	100	100
5	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
6	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2025

Capaian Indikator Kinerja anggaran dinas social tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	584.043.303	-	-	-	-	562.610.848	-	-	-	-	96,33	-	-	-	-	584.043.303	562.610.848
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.335.000	-	-	-	-	2.254.600	-	-	-	-	96,56	-	-	-	-	2.335.000	2.254.600
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	-	-	-	-	4.166.686	-	-	-	-	69,44	-	-	-	-	6.000.000	4.166.686
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.975.000	-	-	-	-	8.467.700	-	-	-	-	84,89	-	-	-	-	9.975.000	8.467.700
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	214.589.190	-	-	-	-	214.223.000	-	-	-	-	99,83	-	-	-	-	214.589.190	214.223.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103.436.405	-	-	-	-	101.933.917	-	-	-	-	98,55	-	-	-	-	103.436.405	101.933.917
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.618.250	-	-	-	-	6.591.750	-	-	-	-	99,60	-	-	-	-	6.618.250	6.591.750
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.832.933	-	-	-	-	16.812.350	-	-	-	-	99,88	-	-	-	-	16.832.933	16.812.350
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.720.950	-	-	-	-	9.701.740	-	-	-	-	99,80	-	-	-	-	9.720.950	9.701.740
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.429.950	-	-	-	-	2.424.000	-	-	-	-	99,76	-	-	-	-	2.429.950	2.424.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.987.625	-	-	-	-	3.874.350	-	-	-	-	97,16	-	-	-	-	3.987.625	3.874.350
	Penyediaan Makanan dan Minuman	22.980.000	-	-	-	-	21.532.200	-	-	-	-	93,70	-	-	-	-	22.980.000	21.532.200
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	185.138.000	-	-	-	-	170.628.555	-	-	-	-	92,16	-	-	-	-	185.138.000	170.628.555

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	227.918.527	-	-	-	-	223.593.425	-	-	-	-	98,10	-	-	-	-	227.918.527	223.593.425
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	133.000.000	-	-	-	-	133.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	133.000.000	133.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	94.918.527	-	-	-	-	90.593.425	-	-	-	-	95,44	-	-	-	-	94.918.527	90.593.425
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.850.000	-	-	-	-	12.600.000	-	-	-	-	84,85	-	-	-	-	14.850.000	12.600.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	14.850.000	-	-	-	-	12.600.000	-	-	-	-	84,85	-	-	-	-	14.850.000	12.600.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.616.160	-	-	-	-	10.405.600	-	-	-	-	98,02	-	-	-	-	10.616.160	10.405.600
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.016.585	-	-	-	-	3.823.900	-	-	-	-	95,20	-	-	-	-	4.016.585	3.823.900
	Penyusunan dokumen peencanaan dan dokumen pelayanan publik	6.599.575	-	-	-	-	6.581.700	-	-	-	-	99,73	-	-	-	-	6.599.575	6.581.700
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (IKAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	334.206.650	-	-	-	-	325.584.605	-	-	-	-	97,42	-	-	-	-	334.206.650	325.584.605
	Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin	18.153.430	-	-	-	-	12.691.930	-	-	-	-	69,91	-	-	-	-	18.153.430	12.691.930
	Penanganan kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu	18.464.825	-	-	-	-	15.646.750	-	-	-	-	84,74	-	-	-	-	18.464.825	15.646.750
	Operasional Program Keluarga Harapan	297.588.395	-	-	-	-	297.245.925	-	-	-	-	99,88	-	-	-	-	297.588.395	297.245.925
6	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	721.359.587	-	-	-	-	548.247.723	-	-	-	-	76,00	-	-	-	-	721.359.587	548.247.723
	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat,	12.570.305	-	-	-	-	12.169.305	-	-	-	-	96,81	-	-	-	-	12.570.305	12.169.305

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	anak nakal																	
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesjahteraan sosial bagi PMKS	40.281.050	-	-	-	-	40.114.050	-	-	-	-	99,59	-	-	-	-	40.281.050	40.114.050
	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial	463.153.497	-	-	-	-	317.369.058	-	-	-	-	68,52	-	-	-	-	463.153.497	317.369.058
	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	90.487.635	-	-	-	-	67.981.815	-	-	-	-	75,13	-	-	-	-	90.487.635	67.981.815
	Peningkatan Kualitas Hidup Bagi Lanjut Usia Melalui Pemberian Bantuan UEP	83.349.905	-	-	-	-	83.124.905	-	-	-	-	99,73	-	-	-	-	83.349.905	83.124.905
	Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia	13.419.130	-	-	-	-	13.247.825	-	-	-	-	98,72	-	-	-	-	13.419.130	13.247.825
	Pembinaan dan bantuan Perbaikan gizi bagi anak terlantar di Luar Panti	10.070.005	-	-	-	-	9.802.705	-	-	-	-	97,35	-	-	-	-	10.070.005	9.802.705
	Pemulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis luar daerah ke daerah Asal	8.028.060	-	-	-	-	4.438.060	-	-	-	-	55,28	-	-	-	-	8.028.060	4.438.060
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	264.764.830	-	-	-	-	217.184.242	-	-	-	-	82,03	-	-	-	-	264.764.830	217.184.242
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	200.019.750	-	-	-	-	156.676.050	-	-	-	-	78,33	-	-	-	-	200.019.750	156.676.050
	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	34.070.650	-	-	-	-	33.639.142	-	-	-	-	98,73	-	-	-	-	34.070.650	33.639.142
	Pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	30.674.430	-	-	-	-	26.869.050	-	-	-	-	87,59	-	-	-	-	30.674.430	26.869.050
8	PROGRAM PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI TMP	72.752.531	-	-	-	-	67.139.765	-	-	-	-	92,29	-	-	-	-	72.752.531	67.139.765
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP	72.752.531	-	-	-	-	67.139.765	-	-	-	-	92,29	-	-	-	-	72.752.531	67.139.765
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	3.085.606.949	3.301.123.506	3.283.863.180	3.471.502.430	-	2.834.122.592	3.027.898.992	2.746.196.206	3.013.108.860	-	91,85	91,72	83,63	86,80	13.142.096.065	11.621.326.650

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	62.058.420	80.949.640	891.143	115.150	-	61.061.200	71.659.900	39.988.450	28.872.000	-	98,39	88,52	97,79	82,22	219.014.360	201.581.550
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.372.355.402	2.393.226.189	2.480.680.569	2.499.983.596	-	2.226.618.424	2.174.275.281	1.961.961.570	2.103.654.427	-	93,86	90,85	79,09	84,15	9.746.245.756	8.466.509.702
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	17.002.240	15.408.280	-	-	-	16.943.040	15.370.000	-	-	-	99,65	99,75	-	32.410.520	32.313.040
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	169.249.035	323.699.375	214.612.35	239.596.350	-	126.541.45	119.454.38	121.489.65	135.984.83	-	74,77	98,69	99,01	90,72	1.102.156.995	1.016.469.931
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	47.025.000	52.763.850	-	-	-	46.440.000	48.250.500	-	-	-	98,76	91,45	99.788.850	94.690.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	299.944.092	298.116.052	297.885.56	280.723.484	-	294.220.946	293.003.28	295.478.21	277.554.500	-	98,09	98,28	99,19	98,87	1.176.669.584	1.160.257.295
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	182.000.000	188.130.000	187.360.00	208.320.00	-	125.680.577	152.562.05	174.467.00	196.793.350	-	69,06	81,09	93,12	94,47	765.810.000	649.504.632
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	234.634.140	317.146.530	285.753.20	204.604.900	-	185.802.26	272.024.90	266.503.00	185.509.950	-	79,19	85,77	93,26	90,67	1.042.139.190	909.840.966
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	99.830	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	99.830	0
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	234.634.140	317.146.530	285.653.90	204.604.900	-	185.802.26	272.024.90	266.503.00	185.509.950	-	79,19	85,77	93,30	90,67	1.042.039.360	909.840.966
11	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	551.585.700	284.153.550	505.167.70	799.097.800	-	486.394.20	248.904.14	245.198.20	674.460.515	-	88,18	87,59	90,11	84,40	2.140.005.020	1.864.958.469
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	366.993.350	214.789.910	505.167.70	799.097.800	-	303.096.20	188.796.24	145.198.20	674.460.515	-	82,59	87,90	90,11	84,40	1.886.049.030	1.621.551.979
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	184.592.350	69.363.640	-	-	-	183.298.00	160.107.690	-	-	-	99,30	86,66	-	-	253.955.990	243.406.490

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
12	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	5.499.999.676	2.038.146.210	5.660.104.570	2.959.195.550	-	1.599.559.720	1.126.287.000	5.038.487.840	2.813.920.950	-	29,08	55,26	89,02	95,09	16.157.446.006	10.578.255.510
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	5.499.999.676	2.038.146.210	5.660.104.570	2.959.195.550	-	1.599.559.720	1.126.287.000	5.038.487.840	2.813.920.950	-	29,08	55,26	89,02	95,09	0	0
13	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	90.818.680.10	38.745.910	17.882.300	30.693.600	-	8.522.700	30.129.900	8.996.500	8.802.500	-	9,38	77,76	50,31	28,68	16.157.446.006	10.578.255.510
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	90.818.680.10	38.745.910	17.882.300	30.693.600	-	8.522.700	30.129.900	8.996.500	8.802.500	-	9,38	77,76	50,85	28,68	178.140.490	56.451.600
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			189.900	-				0	-				0	-	177.950.590	56.451.600	
14	PROGRAM PEGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	31.523.770.40	45.821.200	72.006.540	86.351.600	-	30.841.855	43.533.600	69.002.150	80.144.700	-	97,84	95,01	95,83	92,81	189.900	0
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	31.523.770.40	45.821.200	72.006.540	86.351.600	-	30.841.855	43.533.600	69.002.150	80.144.700	-	97,84	95,01	95,83	92,81	235.703.150	223.522.305

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2025

Berdasarkan tabel 2.3 dan 2.4 terlihat bahwa target dari indikator kinerja program, indikator kinerja daerah (IKD), maupun indikator kinerja kunci (IKK) sudah tercapai bahkan ada yang melebihi target.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial

Kelompok sasaran layanan Dinas Sosial adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Adapun data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kota Payakumbuh Tahun 2024

NO	Jenis PPKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	7 orang
2	Anak Terlantar	33 orang
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	11 orang
4	Anak Jalanan	- Orang
5	Anak dengan Kedisabilitasan	182 orang
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	- Orang
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	- Orang
8	Lanjut Usia Terlantar	491 orang
9	Penyandang Disabilitas	723 orang
10	Tuna Susila	2 orang
11	Gelandangan	Orang
12	Pengemis	20 orang
13	Pemulung	39 orang
14	Kelompok Minoritas	- orang
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan	39 orang
16	Orang dengan HIV/AIDS	2 orang
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	35 orang
18	Korban Trafficking	- orang
19	Korban Tindakkekeraan	3 orang
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	- orang
21	Korban Bencana Alam	- orang
22	Korban Bencana Sosial	- orang
23	Perempuan Rawan Sosial ekonomi	1.348 orang
24	Fakir Miskin	8.339 KK
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	21 orang
26	Komunitas Adat Terpencil	- orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2025

Sedangkan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dimiliki Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 2.6
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kota Payakumbuh Tahun 2024

No.	Jenis PSKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	7
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	136
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	15
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	9
5	Karang Taruna	53
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1
7	Keluarga pioner	-
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	-
9	Wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial	-
10	Penyuluh Sosial	-
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	5
12	Dunia usaha	-

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2025

Salah satu program nasional yang diberikan untuk masyarakat miskin adalah Pemberian beras miskin (raskin) Pada tahun 2019 Program Beras Miskin (Raskin) berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan tahun 2020 Program BPNT berubah lagi menjadi Program Sembako, besar penerimaan/KPM adalah sebesar Rp. 200.000,- /KK. Data tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Data Keluarga Penerima Manfaat Yang Menerima Sembako
Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

NO	KECAMATAN	KPM					PAGU SEMBAKO				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAYAKUMBUH UTARA	1,042	750	1,576	1,386	987	208,40 0,000	150,00 0,000	315,20 0,000	277,20 0,000	197,400 ,000
2	PAYAKUMBUH BARAT	1,558	1,717	2,035	1,830	1,495	311,60 0,000	343,40 0,000	407,00 0,000	366,00 0,000	299,000 ,000
3	PAYAKUMBUH TIMUR	781	495	1,220	1,222	948	156,20 0,000	99,000 ,000	244,00 0,000	244,40 0,000	189,600 ,000

NO	KECAMATAN	KPM					PAGU SEMBAKO				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4	PAYAKUMBUH SELATAN	393	926	557	323	274	78,600,000	185,200,000	111,400,000	64,600,000	54,800,000
5	LAMPOSI TIGO NAGORI	515	1,169	924	807	673	103,000,000	233,800,000	184,800,000	161,400,000	134,600,000
	JUMLAH	4,289	5,057	6,312	5,568	4,377	857,800,000	1,011,400,000	1,262,400,000	1,113,600,000	875,400,000

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2025

Tabel 2.8
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif
Kota payakumbuh Tahun 2024

NO	JENIS PSKS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)			
	Kec. Payakumbuh Barat	2	45	47
	Kec. Payakumbuh Timur	3	18	21
	Kec. Payakumbuh Utara	2	30	32
	Kec. Payakumbuh Selatan	1	19	20
	Kec. Lamposi Tigo Nagori	1	15	16
	TOTAL	9	127	136
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)			
	Kec. Payakumbuh Barat	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Timur	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Utara	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Selatan	0	1	1
	Kec. Lamposi Tigo Nagori	0	1	1
	TOTAL	3	2	5

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2025

Dari data diatas kita bisa melihat jumlah PPKS dan PSKS yang ada di Kota Payakumbuh pada tahun 2024. Bidang sosial mencakup program dan kegiatan yang berkaitan dengan Kesejahteraan sosial, kebijakan pembangunan diprioritaskan pada program jaminan sosial, perlindungan sosial, Rehabilitasi sosial dan Pemberdayaan sosial. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Penilaian sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang berkaitan dengan pelayanan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas data kemiskinan yang komprehensif, valid dan terintegrasi.
2. Belum optimalnya kemandirian PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
3. Belum Optimalnya perlindungan sosial bagi anak, lansia dan disabilitas.
4. Masih ada masyarakat yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasar terutama lanjut usia dan orang dengan kecacatan.
5. Masih ada masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.
6. Masih ada masyarakat yang belum dapat mengakses pendidikan untuk anak sampai usia wajib belajar.
7. Masih ada anak yang tidak memperoleh jaminan dan perlindungan sosial.
8. Kurangnya SDM/ personil yang ada
9. Kurangnya sarana operasional layanan dalam pelayanan di Dinas Sosial
10. Pilar-pilar kesejahteraan sosial sebagai petugas dan tenaga pendamping sosial penanganan masalah sosial belum memperoleh peningkatan SDM dan jaminan kehidupan yang memadai.

11. Permasalahan yang dihadapi masyarakat baik dari kondisi ekonomi, perlakuan yang dialami, dan masalah kesejahteraan sosial lain yang belum sepenuhnya dapat dituntaskan
12. Masih ada pelayanan sosial yang diberikan belum tepat sasaran dan data yang ada belum seluruhnya akurat

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pelayanan Dinas Sosial, pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Payakumbuh dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Payakumbuh serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya Kemandirian PPKS

Yang dimaksud dengan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

- b. Belum optimalnya perlindungan jaminan sosial masyarakat miskin.

Perlindungan jaminan sosial untuk masyarakat miskin belum optimal. Hal ini salah satunya dikarenakan data yang tidak valid sehingga dapat menyebabkan program pengentasan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karena ini diperlukan pengecekan dan verifikasi data untuk memastikan keakuratannya.

- c. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Selain itu, SAKIP juga dirancang untuk mendorong instansi pemerintah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja, sekaligus memperkuat akuntabilitas publik terhadap anggaran.

Tabel 2.9. ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
<p>1. Tingkat Kemiskinan tahun tahun 2024 adalah 5.19</p> <p>2. Persentase PPKS yang terlayani tahun 2024 adalah 100 persen</p> <p>3. Persentase penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM tahun 2024 adalah 100 persen</p> <p>4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota tahun 2024 adalah 100 persen</p>	<p>1. Belum optimalnya kualitas data kemiskinan yang komprehensif, valid dan terintegrasi.</p> <p>2. Belum optimalnya kemandirian PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).</p> <p>3. Belum Optimalnya perlindungan sosial bagi anak, lansia dan disabilitas.</p> <p>4. Masih ada masyarakat yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasar terutama lanjut usia dan orang dengan kecacatan.</p> <p>5. Masih ada masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.</p> <p>6. Masih ada masyarakat yang belum dapat mengakses pendidikan untuk anak sampai usia wajib belajar.</p> <p>7. Masih ada anak yang tidak memperoleh jaminan dan perlindungan sosial.</p> <p>8. Kurangnya SDM/ personil yang ada</p> <p>9. Kurangnya sarana operasional layanan dalam pelayanan di Dinas Sosial</p> <p>10. Pilar-pilar kesejahteraan sosial sebagai petugas dan tenaga pendamping sosial penanganan masalah sosial belum memperoleh peningkatan SDM dan jaminan kehidupan yang memadai.</p> <p>11. Permasalahan yang dihadapi masyarakat baik dari kondisi ekonomi, perlakuan yang dialami, dan masalah kesejahteraan sosial lain yang belum sepenuhnya dapat dituntaskan</p>	<p>Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):</p> <p>Tujuan ke-1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun</p> <p>Tujuan ke-2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan</p>	<p>Asta Cita ke-6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan</p> <p>Asta Cita ke-4: Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda 9Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas</p> <p>Program Prioritas ke-5 Pemberantasan kemiskinan</p>	<p>Misi ke 3 Provinsi Sumbar: Nagari/Desea sebagai basis Kemajuan</p> <p>Sasaran 1 Provinsi sumbar Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi local dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktivasi pusat kreatifitas Nagari (Nagari Crative Hub), untuk mendorong inovasi dan wira usaha di Nagari melalui Internet Gratis, Aktivasi Medan Nan bapaneh, Suduik UMKM dan Teras Nagari 2. Mengembangkan pariwisata berbasis Masyarakat pada nagari-nagari yang memiliki potensi pariwisata 3. Menyediakan sarana dan prasarana aktivitas generasi muda melalui organisasi kepemudaaan 4. Manfasilitasi dan mendorong Bum Nag menjadi penggerak ekonomi nagari 	<p>Masih tingginya kemiskinan di Kota Payakumbuh</p>

	12. Masih ada pelayanan sosial yang diberikan belum tepat sasaran dan data yang ada belum seluruhnya akurat				
--	---	--	--	--	--

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029

Tujuan akhir yang akan dicapai Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah:

“Menurunkan Tingkat Kemiskinan”

dengan indikator: *Tingkat Kemiskinan*. Tujuan ini ada di dalam kerangka pembangunan nasional saat ini.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029

Sasaran Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial, sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatnya PPKS yang terlayani, melalui indikator: Persentase PPKS yang terlayani.
2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial, melalui indikator; Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, melalui indikator : Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat
- 4.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Perlindungan Sosial yang adaptif	Menurunkan Tingkat Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	4.54	4.32	4.17	3.99	3.84	3.63	
		Meningkatnya PPKS yang terlayani	Persentase PPKS yang terlayani	100	86	87	88	89	90	
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-	86	87	88	89	90	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat	95	95	95	95	95	95	

3.3 Strategi Renstra Dinas Sosial

Strategi merupakan rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, pentahapan Pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Dengan kata lain strategi merupakan rangkaian tahapan atau Langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan Pembangunan daerah dalam Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi Pembangunan yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang bersifat operasional. Secara sederhana, perumusan strategi dapat memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah agar diperoleh strategi yang lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Pentahapan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh tahun 2025-2029 seperti tabel berikut :

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Meningkatkan penanggulangan PPKS	Meningkatnya penanggulangan PPKS	Meningkatnya penanggulangan PPKS	Meningkatnya penanggulangan PPKS	Meningkatnya penanggulangan PPKS
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Strategi dalam mencapai sasaran pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh sesuai dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025 – 2029 adalah seperti tabel berikut :

Tabel 3.3
Strategi Dinas Sosial Kota Payakumbuh

NO	STRATEGI DINAS SOSIAL	ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL
1	Meningkatkan penanggulangan PPKS	Meningkatkan akses dan kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial
		Peningkatan akurasi data dan validasi data kemiskinan
		Optimalisasi pemanfaatan system agar tepat sasaran dan tepat guna.
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kesejahteraan sosial
		Melakukan peninjauan terhadap masyarakat miskin
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan	Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan
		Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat
		Memberikan penghargaan atas dedikasi dan pengabdian relawan dalam membantu masyarakat.
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap program jaminan sosial dan bantuan sosial untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas
		Melakukan asesmen langsung pada pelaksanaan program kemiskinan

Sumber : Dinas Sosial 2025

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial

Pada RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2025-2029, arah kebijakan Dinas Sosial dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan Dan Sentra UMKM Yang Kompetitif
MISI I : Mewujudkan SDM Yang Berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Meningkatkannya PPKS yang terlayani.	1. Meningkatkan penanggulangan PMKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial 2. Peningkatan akurasi data dan validasi data kemiskinan 3. Optimalisasi pemanfaatan system agar tepat sasaran dan tepat guna 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kesejahteraan sosial 5. Melakukan peninjauan terhadap masyarakat miskin
		2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan 2. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat 3. Memberikan penghargaan atas dedikasi dan pengabdian relawan dalam membantu masyarakat

VISI : Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan Dan Sentra UMKM Yang Kompetitif
MISI III : Mewujudkan SDM Yang Berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosia	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap program jaminan sosial dan bantuan sosial untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas 2. Melakukan asesmen langsung pada pelaksanaan program kemiskinan

Tabel 3.5
dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Payakumbuh

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatkan pengentasan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT SEN)	Meningkatkan akses dan kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial	
			Peningkatan akurasi data dan validasi data kemiskinan	
		Meningkatkan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis fakta,	Optimalisasi pemanfaatan system agar tepat sasaran dan tepat guna.	
		Pemberian fasilitasi bantuan modal usaha dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin	Optimalisasi peran dan fungsi PSKS dalam melakukan validasi dan verivali data PPKS	
		Percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan graduasi yang terintegrasi	Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap program jaminan sosial dan bantuan sosial untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas.	
		Pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemiskinan	Melakukan asesmen langsung pada pelaksanaan program kemiskinan	
		Pemberian insentif untuk tenaga relawan sosial	Memberikan penghargaan atas dedikasi dan pengabdian relawan dalam membantu masyarakat.	
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat.	
		Peningkatan sarana dan prasarana penggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kesejahteraan sosial.	
		Pendirian sekolah rakyat untuk masyarakat miskin	Melakukan peninjauan terhadap masyarakat miskin.	

Sumber : RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2025-2029

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

4.1 Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Merupakan Hasil Cascading Dari Tujuan, Sasaran, Outcome Dan Output

Program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh ditujukan untuk mendukung tujuan dan sasaran Kepala Daerah yaitu Menurunkan Tingkat Kemiskinan dengan sasaran Meningkatnya PPKS yang terlayani di Kota Payakumbuh. Sasaran ini dicapai dengan strategi meningkatkan peran seluruh elemen dalam pengentasan kemiskinan.

Program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Sosial sangat Mendukung pencapaian tujuan 1 (satu) SDGs yaitu: menanggulangi kemiskinan, yang sudah merupakan program prioritas di Renstra dan Renja Dinas Sosial. Selain itu penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Sosial untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Capaian kinerja Dinas Sosial diarahkan untuk : menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan sesuai dengan target RPJMD tahun 2025-2029.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dimana masing-masing IKSS atau *impact* memiliki target kinerja program (IKP) dan target kinerja kegiatan (IKK). Selanjutnya pada masing-masing IKSS memiliki indikator kinerja sasaran program (outcome) atau IKP dan masing-masing Indikator Kinerja Program (IKP) mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan (output) atau IKK yang merupakan layanan jasa atau produk kegiatan yang dihasilkan. Dilihat secara keseluruhan, pada tataran Dinas Sosial sasaran yang ingin dicapai selama 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya PPKS yang terlayani, melalui indikator (IKSS) adalah;
Persentase PPKS yang terlayani
2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial, melalui indicator adalah :
Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, melalui indikator (IKSS) adalah ; Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Rencana Program, kegiatan dan subkegiatan serta kebutuhan pendanaannya terdapat dalam tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.1
Program / Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Sosial

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Menurunkan Tingkat Kemiskinan				Tingkat Kemiskinan		
		Meningkatnya PPKS yang terlayani			Persentase PPKS yang terlayani		
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial				Program Pemberdayaan Sosial	
			Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan		Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		
			Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ Kota	
					Jumlah keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	
					Persentase Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Persentase Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
					Persentase Penyandang Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
					Persentase Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
				Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial			Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
					Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi		
					Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin		
				Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Persentase korban bencana Alam, Sosial atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

TABEL 4.2
INDIKATOR RENCANA PROGRAM DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
106 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		-	-	5.906.11 4.625	-	5.833,30 3.794	-	14.430,2 12.768	14.464,2 76.851	13.993,77 7.469	14.409,16 9.999		
10601 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	4.035.78 4.275	-	3.793,91 4.419	-	5.818,75 6.158	5.033,66 4.167	5.033,664, 167	5.033,664 ,167		
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM	90	93	4.035.78 4.275	93	3.793,91 4.419	93	5.818,75 6.158	5.033,66 4.167	5.033,664, 167	5.033,664 ,167	1060000 0001000 0 - Dinas Sosial	
10601201 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	75.718.5 00		57.593,6 00		57.365,9 00	57.365,9 00	57.365,90 0	57.365,90 0		
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	13	75.718.5 00	13	57.593,6 00	13	57.365,9 00	57.365,9 00	57.365,90 0	57.365,90 0		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	-	9	-	9	-	-	-	-	-	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
106012010001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	1.916.750		2.434.700	-	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	1.916.750	9	2.434.700	9	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000		
106012010007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	73.801.750	-	51.133.900	-	51.133.900	51.133.900	51.133.900	51.133.900		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	13	73.801.750	13	51.133.900	13	51.133.900	51.133.900	51.133.900	51.133.900		
106012010008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		-	-	-	-	2.012.500	-	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	1	2.012.500	1	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
106012010009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		-	-	-	-	2,012,500	-	2,012,500	2,012,500	2,012,500	2,012,500		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	1	2,012,500	1	2,012,500	2,012,500	2,012,500	2,012,500		
10601202 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	2.714.303.210	-	3,029,705,909	-	3,892,013,138	3,892,013,138	3,892,013,138	3,892,013,138		
Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	21	2.714.303.210	21	3,029,705,909	21	3,892,013,138	3,892,013,138	3,892,013,138	3,892,013,138		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	-	12	-	12	-	-	-	-		
106012020001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	2.511.603.210	-	2,756,165,909	-	3,736,013,138	3,892,013,138	3,892,013,138	3,892,013,138		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	21	2.511.603.210	21	2,756,165,909	21	3,736,013,138	3,736,013,138	3,736,013,138	3,736,013,138		
106012020002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-	202.700.000	-	273,540,000	-	156,000,000	156,000,000	156,000,000	156,000,000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	202.700.000	12	273,540,000	12	156,000,000	156,000,000	156,000,000	156,000,000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ASN													
10601205 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	32.000.000	-	32,329,600	-	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	
Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32	32	32.000.000	32	32,329,600	32	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	
106012050002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	32.000.000	-	32,329,600	-	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32	32	32.000.000	32	32,329,600	32	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	
10601206 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	304.577.850	-	152,659,890	-	264,693,200	264,693,200	264,693,200	264,693,200	264,693,200	
Indeks layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	304.577.850	2	152,659,890	2	264,693,200	264,693,200	264,693,200	264,693,200	264,693,200	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	-	8	-	8	-	-	-	-	-	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	5	-	5	-	6	-	-	-	-	-	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	40	-	40	-	40	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	10	-	10		10	-	-	-	-		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	10	-	10		10	-	-	-	-		
106012060001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	6.905.000	-	3.755,850	-	3.884,000	3.884,000	3.884,000	3.884,000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	6.905.000	8	3.755,850	8	3.884,000	3.884,000	3.884,000	3.884,000		
106012060003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	-	128.419.600	-	97,000	-	108,036.600	108,036.600	108,036,600	108,036,600		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	128.419.600	4	97,000	4	108,036.600	108,036.600	108,036,600	108,036,600		
106012060004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-	-	45.468.500		29,422,890		33,585,500	33,585,500	33,585,500	33,585,500		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	5	45.468.500	5	29,422,890	6	33,585,500	33,585,500	33,585,500	33,585,500		
106012060005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		-	-	15.090.000	-	15,334,500	-	15,090,000	15,090,000	15,090,000	15,090,000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	15.090.000	2	15,334,500	2	15,090,000	15,090,000	15,090,000	15,090,000		
106012060006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		-	-	3.754.450	-	4,343,200	-	4,343,500	4,343,500	4,343,500	4,343,500		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	3.754.450	2	4,343,200	2	4,343,500	4,343,500	4,343,500	4,343,500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
106012060008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	-	7.045.300	-	4,553,950	-	4,601,100	4,601,100	4,601,100	4,601,100		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	10	7.045.300	10	4,553,950	10	4,601,100	4,601,100	4,601,100	4,601,100		
106012060009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	97.895.000	-	93,140,000	-	93,140,000	93,140,000	93,140,000	93,140,000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	40	97.895.000	40	93,140,000	40	93,140,000	93,140,000	93,140,000	93,140,000		
106012060010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	-	-	-	2,012,500	-	2,012,500	2,012,500	2,012,500	2,012,500		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	10	2,012,500	10	2,012,500	2,012,500	2,012,500	2,012,500		
10601207 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	353.695.000	-	194,000	-	251,541,000	266,449,009	266,449,009	266,449,009		
Persentase ketersediaan BMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	4	353.695.000	4	194,000	3	251,541,000	251,541,000	251,541,000	251,541,000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	9	-	9	-	2	-	-	-	-		
106012070005 - Pengadaan Mebel		-	-	187.723.000	-	97,000	-	163,923,000	163,923,000	163,923,000	163,923,000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	4	187.723.000	4	97,000	3	163,923,000	163,923,000	163,923,000	163,923,000		
106012070006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	165.972.000	-	97,000	-	87,618,000	102,526,009	102,526,009	102,526,009		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANG KAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	9	165.972.000	9	97,000	2	87,618,000	102,526,009	102,526,009	102,526,009		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		-	-	-	-	-	-	800,000,000	-	-	-		
10601208 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	282.429.715	-	309,977,060	-	309,688,560	309,688,560	309,688,560	309,688,560		
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	282.429.715	12	309,977,060	12	309,688,560	309,688,560	309,688,560	309,688,560		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	-	12	-	12	-	-	-	-		
106012080002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	-	3.688.560	-	3,977,060	-	3,688,560	3,688,560	3,688,560	3,688,560		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	3.688.560	12	3,977,060	12	3,688,560	3,688,560	3,688,560	3,688,560		
106012080004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	-	278.741.155	-	306,000,000	-	306,000,000	306,000,000	306,000,000	306,000,000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	278.741.155	12	306,000,000	12	306,000,000	306,000,000	306,000,000	306,000,000		
10601209 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	273.060.000	-	211,454,360	-	211,454,360	211,454,360	211,454,360	211,454,360		
Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	17	17	273.060.000	17	211,454,360	17	211,454,360	211,454,360	211,454,360	211,454,360		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANG KAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Perizinannya												
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	-	12	-	12	-	-	-	-		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-		
106012090001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	-	42.950.000	-	39,190,000	-	39,190,000	39,190,000	39,190,000	39,190,000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	42.950.000	1	39,190,000	1	39,190,000	39,190,000	39,190,000	39,190,000		
106012090002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	216.640.000	-	159,160,000	-	159,160,000	159,160,000	159,160,000	159,160,000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	17	216.640.000	17	159,160,000	17	159,160,000	159,160,000	159,160,000	159,160,000		
106012090006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	13.470.000	-	13,104,360	-	13,104,360	13,104,360	13,104,360	13,104,360		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANG KAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	13.470.000	12	13,104,360	12	13,104,360	13,104,360	13,104,360	13,104,360		
10602 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		-	-	390.482.500	-	476,882,225	-	1,274,920,110	1,691,076,184	1,220,576,802	1,635,969,332		
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100	100	390.482.500	100	476,882,225	100	1,274,920,110	1,691,076,184	1,220,576,802	1,635,969,332	106000000010000 - Dinas Sosial	
10602202 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	6.093.500	-	11,311,350	-	11,311,350	11,311,350	11,311,350	11,311,350		
Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	1	6.093.500	1	11,311,350	1	11,311,350	11,311,350	11,311,350	11,311,350		
106022020003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		-	-	6.093.500	-	11,311,350	-	11,311,350	11,311,350	11,311,350	11,311,350		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	1	6.093.500	1	11,311,350	1	11,311,350	11,311,350	11,311,350	11,311,350		
10602203 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		-	-	384.389.000	-	465,570,875	-	1,263,608,760	1,679,764,834	1,209,265,452	1,624,657,982		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11	11	384.389.000	11	465,570,875	11	1,263,608,760	1,679,764,834	1,209,265,452	1,624,657,982		
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	6	6	-	6	-	6	-	-	-	-		
	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-		
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	136	155	-	155	-	155	-	-	-	-		
106022030004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	66.692.000	-	55,709,650	-	125,708,500	125,708,500	125,708,500	125,708,500		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11	11	66.692.000	11	55,709,650	11	125,708,500	125,708,500	125,708,500	125,708,500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANG KAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
106022030012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		-	-	5.722.000	-	10,057,000	-	115,973,760	532,129,834	532,129,834	532,129,834		
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	6	6	5.722.000	6	10,057,000	6	115,973,760	532,129,834	532,129,834	532,129,834		
106022030014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	311.975.000	-	399,705,425	-	1,021,826,500	1,021,826,500	551,327,118	966,719,648		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	136	143	311.975.000	155	399,705,425	155	1,021,826,500	1,021,826,500	551,327,118	966,719,648		
106022030015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi		-	-	-	-	98,800	-	100,000	100,000	100,000	100,000		
Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-	-	-	1	98,800	1	100,000	100,000	100,000	100,000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANG KAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
10604 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		-	-	571.290.700	-	507,688,425	-	2,319,685,700	2,722,685,700	2,722,685,700	2,722,685,700		
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	80	100	571.290.700	100	507,688,425	100	2,319,685,700	2,722,685,700	2,722,685,700	2,722,685,700	106000000010000 - Dinas Sosial	
10604201 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		-	-	571.290.700	-	477,700,650	-	2,309,685,700	2,712,685,700	2,712,685,700	2,712,685,700		
Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	571.290.700	20	477,700,650	20	2,309,685,700	2,712,685,700	2,712,685,700	2,712,685,700		
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	120	130	-	130	-	130	-	-	-	-		
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	120	120	-	120	-	120	-	-	-	-		
106042010001 - Penyediaan Permakanaan		-	-	490.997.250	-	400,965,825	-	1,540,984,750	1,738,984,750	1,738,984,750	1,738,984,750		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANG KAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	120	120	490.997.250	120	400,965,825	120	1,540,984,750	1,738,984,750	1,738,984,750	1,738,984,750		
106042010002 - Penyediaan Sandang		-	-	22.655.300	-	24,632,600	-	224,667,800	274,667,800	274,667,800	274,667,800		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	22.655.300	1	24,632,600	1	224,667,800	274,667,800	274,667,800	274,667,800		
Penyediaan Alat bantu		-	-	-	-	-	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000		
106042010004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		-	-	27.336.250	-	52,003,425	-	105,321,000	135,321,000	135,321,000	135,321,000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	27.336.250	20	52,003,425	20	105,321,000	135,321,000	135,321,000	135,321,000		
106042010005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		-	-	30.301.900	-	98,800	-	243,712,150	343,712,150	343,712,150	343,712,150		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	120	130	30.301.900	130	98,800	130	243,712,150	343,712,150	343,712,150	343,712,150		
Perbekalan kesehatan		-	-	-	-	-	-	45,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000		
10604202 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban		-	-	-	-	29,987,775	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANG KAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial													
Persentase keadaan darurat yang ditanggapi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	-	-	1	29,987,775	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
106042020002 - Pemberian Layanan Kedaruratan			-	-	-	29,987,775	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	-	-	1	29,987,775	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
10605 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		-	-	680.239.850	-	890,977,750	-	4,190,977,750	4,190,977,750	4,190,977,750	4,190,977,750		
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	80	90	680.239.850	90	890,977,750	95	4,190,977,750	4,190,977,750	4,190,977,750	4,190,977,750	106000000010000 - Dinas Sosial	
10605202 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	680.239.850	-	890,977,750	-	4,190,977,750	4,190,977,750	4,190,977,750	4,190,977,750		
Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	8200	8200	680.239.850	8200	890,977,750	8200	4,190,977,750	4,190,977,750	4,190,977,750	4,190,977,750		
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	55	55	-	55	-	55	-	-	-	-		
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	70	70	-	70	-	70	-	-	-	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANG KAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	40000	40000	-	40000		40000	-	-	-	-		
106052020001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	71.374.750	-	206,847,250	-	206,847,250	206,847,250	206,847,250	206,847,250		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	40000	40000	71.374.750	40000	206,847,250	40000	206,847,250	206,847,250	206,847,250	206,847,250		
106052020004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		-	-	490.228.600	-	335,589,650	-	2,085,589,650	2,085,589,650	2,085,589,650	2,085,589,650		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	70	119	490.228.600	70	335,589,650	70	2,085,589,650	2,085,589,650	2,085,589,650	2,085,589,650		
106052020006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		-	-	-	-	209,420,600	-	959,420,600	959,420,600	959,420,600	959,420,600		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	55			55	209,420,600	55	959,420,600	959,420,600	959,420,600	959,420,600		
106052020008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	118.636.500	-	139,120,250	-	939,120,250	939,120,250	939,120,250	939,120,250		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANG KAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	8200	8200	118.636.500	8200	139.120.250	8200	939.120.250	939.120.250	939.120,250	939.120,250		
10606 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA		-	-	103.348.800	-	91.792,300	-	320.823,800	320.823,800	320.823,800	320.823,800		
Meningkatnya Penanganan Bencana	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	103.348.800	100	91.792,300	100	300.687,800	300.687,800	300.687,800	300.687,800	10600000001000 - Dinas Sosial	
10606201 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		-	-	83.212.800	-	71.692,000	-	300.687,800	300.687,800	300.687,800	300.687,800		
Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	83.212.800	1	71.692,000	1	300.687,800	300.687,800	300.687,800	300.687,800		
	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5	-	5	-	5	-	-	-	-		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25	-	25	-	25	-	-	-	-		
106062010001 - Penyediaan Makanan		-	-	39.172.000	-	34.945,750	-	175.697,000	175.697,000	175.697,000	175.697,000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25	39.172.000	25	34,945,750	25	175,697,000	175,697,000	175,697,000	175,697,000		
106062010002 - Penyediaan Sandang		-	-	23.290.400	-	26,433,100	-	99,990,400	99,990,400	99,990,400	99,990,400		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	23.290.400	1	26,433,100	1	99,990,400	99,990,400	99,990,400	99,990,400		
106062010007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		-	-	20.750.400	-	10,313,150	-	25,000,400	25,000,400	25,000,400	25,000,400		
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5	20.750.400	5	10,313,150	5	25,000,400	25,000,400	25,000,400	25,000,400		
10606202 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		-	-	20.136.000	-	20,100,300	-	20,136,000	20,136,000	20,136,000	20,136,000		
Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	20.136.000	2	20,100,300	2	20,136,000	20,136,000	20,136,000	20,136,000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-		
106062020001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		-	-	99,000	-	98,800	-	99,000	99,000	99,000	99,000		
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	99,000	2	98,800	2	99,000	99,000	99,000	99,000		
106062020002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		-	-	20.037,000	-	20,001,500	-	20,037,000	20,037,000	20,037,000	20,037,000		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	20.037,000	2	20,001,500	2	20,037,000	20,037,000	20,037,000	20,037,000		
10607 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		-	-	125.086.500	-	72,048,675	-	505,049,250	505,049,250	505,049,250	505,049,250		
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100	100	125.086.500	100	72,048,675	100	505,049,250	505,049,250	505,049,250	505,049,250	106000000010000 - Dinas Sosial	
10607201 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		-	-	125.086.500	-	72,048,675	-	505,049,250	505,049,250	505,049,250	505,049,250		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANG KAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028	2029	2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	289	289	125.086.500	289	72,048,675	289	505,049,250	505,049,250	505,049,250	505,049,250		
	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-		
106072010001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		-	-	45.761.000	-	48,591,475	-	356,591,500	356,591,500	356,591,500	356,591,500		
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	2	45.761.000	2	48,591,475	2	356,591,500	356,591,500	356,591,500	356,591,500		
106072010002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		-	-	79.325.500	-	23,457,200	-	148,457,750	148,457,750	148,457,750	148,457,750		
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	289	289	79.325.500	289	23,457,200	289	148,457,750	148,457,750	148,457,750	148,457,750		

Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Daftar subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET.
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	
				Penyediaan Sandang	
				Penyediaan Alat Bantu	
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
	Penyediaan Perbekalan kesehatan				

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET.
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa Dinas Sosial memiliki 3 program Prioritas yang mendukung pembangunan daerah.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Urusan Sosial									
1	Tingkat Kemiskinan	%	5.12	4.51	3.67	2.86	2.01	1.39	0.68	
2	Persentase PPKS yang terlayani	%	100	100	86	87	88	89	90	
3	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	-	86	87	88	89	90	
4	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	94	95	95	95	95	95	95	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Urusan Sosial									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V **P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh 2025– 2029 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial (2025–2029) dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2025 – 2029 dan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara nasional. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2023–2026 telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik, dimana ternyata masih memiliki kekuatan untuk menggerakkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Capaian tujuan yang ditujukan kepada sasaran strategis Dinas Sosial 2025-2029 diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial, sasaran strategis tersebut adalah :

1. Meningkatnya PPKS yang terlayani, melalui indikator :
Persentase PPKS yang terlayani
2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial, melalui indikator:
Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhannya
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, melalui indikator:
Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Untuk mengukur capaian tujuan melalui sasaran strategis tersebut, diperoleh dari data hasil monitoring dan evaluasi, serta para pihak Data lainnya terkait dengan capaian kinerja yang ditetapkan Dinas Sosial dari berbagai sumber yang melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial dengan merujuk pada indikator kinerja sasaran strategis (IKSS/impact), indikator kinerja program (IKP/outcome) dan indikator kinerja kegiatan (IKK/output) yang telah ditetapkan, serta merujuk pada parameter ukuran keberhasilan yang ditetapkan dalam Renstra dirumuskan terpisah melalui Ketetapan Kepala Dinas Sosial.

Demikian Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 ini dibuat. Kami berharap Renstra ini dapat menjadi bahan acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan penilaian Dinas Sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Payakumbuh, September 2025
Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



Yonrefli

YONREFLI, S.Sos, M.AP
NIP. 19691108 199103 1 006